

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Shalehah¹, Siti Raudah², Gusti Muhammad Hidayatullah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: lehah1508@gmail.com

ABSTRAK

Program Pemberdayaan Perempuan adalah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan peran, kualitas hidup, dan status perempuan dalam masyarakat. Namun, dalam implementasinya, program ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Hal ini terlihat dari minimnya pemahaman masyarakat mengenai pemberdayaan perempuan, belum optimalnya program seperti Pengarusutamaan Gender (PUG), serta kurangnya evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh dari 12 informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Validitas data diuji melalui metode seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketelitian, triangulasi, penggunaan referensi, dan member-check. Hasil analisis data mengungkapkan bahwa Program Pemberdayaan Perempuan masih belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Adapun beberapa indikator yang menunjukkan efektivitas program meliputi kemampuan operasional dalam melaksanakan program, mekanisme kegiatan, ketepatan sasaran, prosedur dalam menentukan sasaran. Indikator yang dinilai cukup efektif seperti pencapaian target program. Namun, ada aspek yang belum optimal, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk pemberdayaan perempuan, kepuasan masyarakat, penilaian efektivitas organisasi, dan efektivitas organisasi secara menyeluruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program terbagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya mekanisme kerja yang baik dan sasaran program yang jelas. Sementara itu, faktor penghambat mencakup kekurangan sumber daya manusia yang memadai, dan terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa aspek program telah berjalan dengan baik, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan. Oleh karena itu, disarankan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara kerja yang sesuai dengan kebutuhan, serta alokasi anggaran yang memadai untuk memastikan program dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, penting bagi kepala bidang terkait untuk terus meningkatkan koordinasi antarinstansi, memberikan pelatihan kepada staf, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi program. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan Program Pemberdayaan Perempuan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas, Program, Pemberdayaan, Perempuan

ABSTRACT

The Women's Empowerment Program is an effort aimed at improving the role, quality of life, and status of women in society. However, in its implementation, this program still faces various challenges that hinder its effectiveness. This is evident from the limited public understanding of

women's empowerment, the suboptimal implementation of programs such as Gender Mainstreaming (PUG), and the lack of regular evaluation and monitoring of its execution. This study aims to evaluate the effectiveness of the Women's Empowerment Program implemented by the Women's Empowerment and Child Protection Service of Hulu Sungai Utara Regency, and to identify the factors that influence it. This study uses a qualitative descriptive method, with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Data were obtained from 12 informants selected through purposive sampling techniques. Data validity was tested through methods such as extended observation, increased accuracy, triangulation, use of references, and member-checking. The results of the data analysis revealed that the Women's Empowerment Program has not yet reached the expected level of effectiveness. Several indicators that show the effectiveness of the program include operational capacity in program implementation, activity mechanisms, target accuracy, and procedures for determining targets. Indicators that are considered quite effective include the achievement of program targets. However, there are aspects that are still not optimal, particularly in terms of meeting the needs for women's empowerment, public satisfaction, the assessment of organizational effectiveness, and overall organizational effectiveness. Factors that influence program effectiveness are divided into two, namely supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors include the existence of a good working mechanism and clear program targets. Meanwhile, inhibiting factors include the lack of adequate human resources, limited facilities and infrastructure, and the minimal budget available to support program implementation. The conclusion of this study shows that although some aspects of the program have been running well, there is an urgent need to improve overall effectiveness. Therefore, it is recommended that the Women's Empowerment and Child Protection Service of Hulu Sungai Utara Regency work in accordance with needs, as well as adequate budget allocation to ensure that the program can run optimally. In addition, it is important for the heads of related fields to continue to improve coordination between agencies, provide training to staff, and strengthen program monitoring and evaluation mechanisms. With these efforts, it is hoped that the Women's Empowerment Program can be more effective in achieving its main objectives, namely improving the quality of life and the role of women in society.

Keywords: Effectiveness, Program, Empowerment, Women

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan modern, pemberdayaan menjadi elemen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi perempuan. Pemberdayaan merujuk pada proses memberikan motivasi, dukungan, pendampingan, serta pembimbingan untuk mengubah pola pikir atau kebiasaan lama menjadi lebih baik dan bermanfaat. Tujuan utama pemberdayaan adalah mengembangkan potensi individu sehingga mereka mampu menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan produktif.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya yang terus berkelanjutan untuk memberikan perempuan hak dan kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pengambilan keputusan. Tujuannya adalah meningkatkan peran perempuan secara aktif dalam masyarakat serta memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka. Melalui pemberdayaan ini, perempuan diharapkan dapat berpartisipasi secara seimbang dalam keluarga dan masyarakat, sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan gender.

Perbedaan gender telah menjadi isu sosial yang berlangsung lama. Ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan sering kali menciptakan berbagai bentuk diskriminasi, termasuk kekerasan domestik, eksploitasi, hingga pengabaian hak-hak perempuan. Dalam lingkungan rumah tangga, perempuan sering dianggap hanya sebagai penunjang atau pendukung keluarga yang tugasnya terbatas pada kegiatan domestik, seperti mengurus anak, memasak, dan membersihkan rumah. Anggapan ini memperkuat stereotip bahwa perempuan adalah pihak yang lemah, sehingga kontribusi mereka dalam

bidang masyarakat, ekonomi, maupun pemerintahan kerap diabaikan.

Masyarakat sering kali melihat perempuan sebagai individu yang sepenuhnya bergantung pada laki-laki, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Paradigma ini menghambat perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Padahal, perempuan memiliki potensi besar yang apabila diberdayakan dengan baik dapat memberikan dampak signifikan pada keluarga, masyarakat, dan negara.

Pemberdayaan perempuan merupakan langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Proses ini tidak hanya memengaruhi kehidupan individu perempuan, tetapi juga memberikan dampak positif pada generasi mendatang. Dengan memperluas akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, akan tercipta masyarakat yang lebih inklusif.

Berbagai persoalan yang dihadapi perempuan di masyarakat memiliki banyak penyebab, salah satunya adalah pengaruh budaya patriarki yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah sering kali menjadi penghalang bagi perempuan untuk memperoleh keterampilan yang mendukung partisipasi mereka di luar lingkup domestik. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk mendorong kesetaraan dan keterlibatan perempuan dalam organisasi maupun dalam masyarakat secara umum.

Salah satu institusi yang berperan dalam mendukung pemberdayaan perempuan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), khususnya di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga (KHPK). Bidang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarganya melalui berbagai program pemberdayaan yang terencana dengan baik.

Program pemberdayaan perempuan berfokus pada penguatan peran dan status perempuan di masyarakat. Tujuan utama dari program ini adalah mewujudkan kesetaraan gender dengan memberikan perempuan akses yang setara untuk mengelola diri dan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Hal ini bertujuan agar perempuan dapat aktif berpartisipasi dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah, sekaligus mengembangkan keterampilan serta membangun konsep diri yang positif.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pasal 3, disebutkan bahwa partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendukung terwujudnya kesetaraan gender, melindungi hak-hak perempuan, memenuhi hak anak, dan memberikan perlindungan khusus bagi anak. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan dan anak dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam konteks Kabupaten Hulu Sungai Utara, Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga pada DPPPA menjalankan beberapa program utama, di antaranya:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, pengarusutamaan gender adalah strategi untuk memastikan integrasi dimensi gender dalam setiap aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan nasional. Kegiatan yang termasuk dalam program ini meliputi studi terkait gender, pelatihan keterampilan bagi perempuan produktif di pedesaan, dan pertemuan yang mendukung pengarusutamaan gender, seperti rapat lintas organisasi perangkat daerah (SKPD).

2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini berfokus pada sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang bertujuan meningkatkan kualitas keluarga sekaligus memastikan pemenuhan hak-hak anak. Berbagai kegiatan dilakukan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung pertumbuhan optimal bagi anggota keluarganya.

Hasil observasi menunjukkan sejumlah tantangan terkait pemberdayaan perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Tingkat pemahaman masyarakat mengenai pemberdayaan perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih rendah. Hal ini mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pemberdayaan perempuan dan isu-isu gender seperti kekerasan berbasis gender, diskriminasi, hak-hak perempuan, serta peran perempuan dalam ekonomi dan politik. Akibatnya, kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender masih belum memadai.

2. Tidak Maksimalnya Program Pengarusutamaan Gender (PUG)

Program seperti Pengarusutamaan Gender (PUG), yang seharusnya di semua kebijakan di mana perspektif gender sepenuhnya diperhatikan dan diintegrasikan, belum berjalan dengan optimal. Hal ini berdampak pada kebijakan yang tidak dapat mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki.

3. Minimnya Evaluasi dan Pemantauan Program

Kegiatan seperti pelatihan dan keterampilan untuk perempuan di desa-desa belum dilakukan secara berkelanjutan akibat kurangnya evaluasi dan pemantauan. Kondisi ini membuat dampak program pemberdayaan perempuan menjadi kurang maksimal dan tidak berlangsung secara konsisten.

Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*effective*," yang berarti berhasil atau mencapai hasil yang diinginkan dengan baik.

Dalam Kamus Ilmiah Populer, efektivitas didefinisikan sebagai ketepatan dalam penggunaan sumber daya, pencapaian hasil, serta kesesuaian dengan tujuan yang hendak dicapai. Robbins (dalam Kartina & Handoko, 2019:21) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Efektivitas dapat dianggap sebagai konsep yang berfokus pada keberhasilan upaya untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Beni (2016) dalam Tadi Aryadi (2020:27), efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil (output) dan tujuan. Ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian hasil, kebijakan, dan prosedur yang diterapkan oleh suatu organisasi.

Sedarmayati (2014:59) mengartikan efektivitas sebagai ukuran yang menunjukkan sejauh mana target dapat dicapai. Penekanannya lebih pada hasil yang diperoleh (output) daripada proses penggunaan sumber daya (input). Bahkan ketika tingkat efektivitas meningkat, efisiensi belum tentu ikut meningkat secara bersamaan.

Pasolong (2022:4) mengemukakan bahwa efektivitas berasal dari kata "efek," yang mencerminkan hubungan sebab-akibat. Efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya melalui proses kegiatan tertentu. Sementara itu, James L. Gibson dkk., (dalam Pasolong, 2022:4) menyatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran yang menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi.

Pendapat Drucker (dalam Mutiarin & Zaenudin, 2014:96) mempertegas bahwa efektivitas berarti melakukan hal yang benar, atau sejauh mana tujuan dapat diraih dengan baik.

Secara umum, efektivitas berfokus pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Suatu organisasi dapat dinilai efektif jika mampu merealisasikan target yang telah dirancang sebelumnya. Demikian pula, program-program yang dinilai efektif adalah program yang mampu memenuhi ukuran-ukuran efektivitas yang telah ditentukan.

Menurut Campbell J.P (1970), sebagaimana dikutip dalam Manajemen Birokrasi dan Kebijakan oleh Dyah Mutiarin & Arif Zaenudin (2014:96-97), efektivitas suatu program atau organisasi dapat diukur melalui lima kriteria utama berikut ini:

1. Keberhasilan Program

Efektivitas suatu program dapat dilihat dari kemampuan operasional organisasi dalam menjalankan program kerja yang sesuai dengan tujuan awal. Keberhasilan program ini bergantung pada proses dan mekanisme pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, evaluasi efektivitas melibatkan sejauh mana pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Keberhasilan Sasaran

Penilaian efektivitas juga bergantung pada pencapaian tujuan dengan fokus pada aspek keluaran (output). Dalam hal ini, efektivitas dapat diukur berdasarkan sejauh mana hasil yang diharapkan dari kebijakan dan prosedur organisasi telah tercapai, serta sejauh mana tujuan spesifik yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

3. Kepuasan Terhadap Program

Efektivitas dapat dinilai dari tingkat kepuasan pengguna layanan atau produk yang dihasilkan oleh program tersebut. Kepuasan pengguna mencerminkan kualitas program, di mana semakin tinggi kualitas layanan atau produk yang diberikan, semakin besar kepuasan yang dirasakan oleh pengguna. Kepuasan ini pada akhirnya memberikan manfaat positif bagi organisasi atau lembaga.

4. Perbandingan Tingkat Input dan Output

Efektivitas juga dapat diukur melalui efisiensi, yang dinilai berdasarkan hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output). Apabila output yang dihasilkan lebih besar dibandingkan input yang digunakan, program dapat dianggap efisien. Sebaliknya, jika input melebihi output, program tersebut dinilai tidak efisien.

5. Pencapaian Tujuan Secara Menyeluruh

Efektivitas secara umum dapat diukur dari sejauh mana organisasi mampu melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan besar yang telah ditetapkan. Penilaian ini melibatkan pengukuran menggunakan sebanyak mungkin kriteria untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan organisasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), program adalah suatu rancangan yang mencakup asas dan usaha yang akan dijalankan oleh individu atau kelompok tertentu. Program ini juga menjadi bagian integral dari perencanaan dalam pelaksanaannya.

Dalam pandangan Afriansyah, dkk (2023:1), pemberdayaan atau *empowerment* adalah sebuah konsep yang berkembang dari dinamika pikiran masyarakat dan budaya. Djohani, sebagaimana dikutip dalam Anwas (2014:49), mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses memberi daya atau kekuatan kepada pihak yang lemah, bertujuan untuk mengurangi dominasi pihak yang kuat sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan.

Haryono Suryono, dalam penelitian Nasira (2017:12), menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup perempuan di berbagai bidang, seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi, guna membebaskan mereka dari ketertinggalan dan kemiskinan. Sementara itu, menurut Sulaiman Asang (dikutip oleh Feni Auralia, 2018:25-26), pemberdayaan perempuan merupakan pendekatan baru dalam pembangunan dengan tujuan memberdayakan perempuan melalui pengembangan potensi dan kekuatan mereka. Proses ini melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Memotivasi Perempuan

Mendorong perempuan agar memiliki semangat dalam proses pemberdayaan. Hal ini dilakukan untuk membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian perempuan.

2. Menggali Potensi Perempuan

Melakukan upaya untuk mengembangkan potensi fisik dan keterampilan perempuan. Tujuan utamanya adalah membantu perempuan menentukan arah hidupnya, menjadi lebih mandiri, dan menciptakan kesetaraan gender. Perempuan didorong untuk mengoptimalkan peluang dan mengambil langkah aktif dalam kehidupannya.

3. Membangkitkan Kesadaran Potensi Diri

Pemberdayaan perempuan juga bertujuan membangun kesadaran diri mereka terhadap potensi yang dimiliki. Dengan pemahaman tersebut, perempuan dapat lebih mudah mengorganisir diri, menciptakan perubahan, serta berkembang ke arah yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

4. Memberikan Kesempatan untuk Berperan

Proses pemberdayaan perempuan melibatkan pemberian ruang dan kesempatan yang luas kepada perempuan untuk berinisiatif dan mengambil peran aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan perempuan untuk tumbuh dan membuat keputusan secara independen, sehingga kontribusinya dapat berdampak lebih besar.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Artinya variabel yang diuji bersifat unik. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyatakan sesuatu yang menjadi pokok kajiannya secara rinci. Artinya penelitian dilakukan untuk memperjelas seluruh atau berbagai aspek dan tujuan penelitian. Data Primer yaitu semua data hasil penelitian yang didapat melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan. data sekunder, cara mengumpulkan informasi dengan melaksanakan studi kepustakaan dan menggali informasi terkait penelitian dari bahan kepustakaan seperti dokumen dan arsip. Sumber data yang dipakai yaitu snowball sampling. Menurut Sujewerni (2020: 72), metode pengambilan sampel dimulai dengan jumlah yang kecil dan lambat laun bertambah besar, seperti bola salju yang menggelinding.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Keberhasilan Program

Efektivitas suatu program terlihat dari kemampuan menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Keberhasilan tersebut dapat diukur berdasarkan proses dan mekanisme pelaksanaan kegiatan di lapangan.

a. Kemampuan Operasional Melaksanakan Program

Kemampuan operasional merujuk pada kemampuan untuk menjalankan program kerja dengan semua tugas inti yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemampuan operasional dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan dinilai efektif. Pelaksanaan program dan kegiatan didahului dengan perencanaan matang yang mencakup lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, dan hasil yang diharapkan.

Pendekatan ini sejalan dengan teori Campbell J.P, sebagaimana dijelaskan oleh Mutiarin & Zaenudin (2014:96-97). Mereka menyatakan bahwa keberhasilan program bergantung pada efektivitas operasional dalam menjalankan program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Mekanisme Kegiatan

Mekanisme kegiatan mencakup tahapan kegiatan, penjadwalan waktu, dan lokasi pelaksanaan yang harus sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah disusun. Mekanisme kegiatan dalam program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga dinilai efektif. Penyusunan mekanisme kegiatan dilakukan secara terorganisir oleh Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga. Proses ini meliputi penentuan lokasi pelaksanaan, identifikasi sasaran, serta perumusan tujuan kegiatan.

Pendekatan ini konsisten dengan teori yang diungkapkan oleh Campbell J.P dalam buku Mutiarin & Zaenudin (2014:96-97), yang menyebutkan bahwa keberhasilan program dapat dievaluasi melalui kemampuan operasional untuk menjalankan program kerja dan menilai proses serta mekanisme pelaksanaannya di lapangan.

Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang sesuai, diharapkan program pemberdayaan perempuan tidak hanya mencapai tujuan tetapi juga berdampak langsung pada sasaran yang diinginkan.

2. Pencapaian Tujuan

Efektivitas dapat dinilai dari sejauh mana tujuan tercapai, dengan fokus pada aspek output. Artinya, keberhasilan dinilai berdasarkan tingkat keluaran yang dihasilkan oleh kebijakan dan prosedur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

a. Ketetapan Sasaran

Ketetapan sasaran merujuk pada kejelasan tujuan yang ingin dicapai melalui rencana atau kegiatan, mencakup aspek spesifik seperti apa yang akan diraih, waktu pelaksanaan, serta cara pencapaiannya dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara dinilai efektif karena memiliki sasaran yang jelas, yaitu perempuan dan isu gender.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Campbell J.P (dalam Mutiarin & Zaenudin, 2014:96-97), yang menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur dari pencapaian tujuan dengan fokus pada aspek keluaran.

b. Prosedur Dalam Menentukan Sasaran

Prosedur adalah serangkaian langkah yang sistematis dan terorganisir untuk menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas, dengan berpedoman pada instruksi dan aturan yang telah ditetapkan.

Prosedur dalam organisasi telah berjalan efektif. Program Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dirancang dengan baik, mengikuti aturan dan kebijakan yang berlaku, guna mendukung akuntabilitas kinerja.

Pendekatan ini sesuai dengan teori Campbell J.P (dalam Mutiarin & Zaenudin, 2014:96-97), yang menyatakan bahwa keberhasilan sasaran dapat dilihat dari seberapa baik tujuan tercapai melalui fokus pada aspek output.

3. Kepuasan terhadap Program

Kepuasan merupakan salah satu indikator efektivitas program yang berkaitan dengan kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan penerima manfaat. Hal ini mencakup bagaimana pengguna merasakan kualitas hasil produk atau jasa yang diberikan. Kualitas yang baik akan meningkatkan kepuasan pengguna, sehingga menghasilkan dampak positif bagi lembaga pelaksana program.

a. Pemenuhan Kebutuhan Program

Pemenuhan kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan program, baik yang berwujud (barang dan jasa) maupun yang tidak berwujud. Pemenuhan kebutuhan juga dipengaruhi oleh faktor penting seperti tingkat prioritas, sifat, dan waktu pelaksanaannya.

Namun, dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, pemenuhan kebutuhan belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas kantor untuk menunjang pelaksanaan program. Bahkan, alokasi anggaran untuk program seringkali belum memadai, sehingga kebutuhan di berbagai aspek belum tercukupi.

Kondisi ini bertentangan dengan teori Campbell J.P yang dikutip oleh Mutiarin & Zaenudin (2014:96-97), di mana salah satu indikator efektivitas mengacu pada kemampuan program untuk memenuhi kebutuhan penggunanya.

b. Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat merupakan hasil evaluasi pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang diberikan. Indikator ini juga mengukur seberapa baik program berhasil memenuhi harapan pengguna. Jika kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik, maka tingkat kepuasan akan meningkat, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi lembaga pelaksana program.

Namun, dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Hulu

Sungai Utara, tingkat kepuasan masyarakat terbilang belum efektif. Hal ini terlihat dari kegiatan program pemberdayaan perempuan seperti pelatihan keterampilan hanya dilakukan satu kali, selain itu permasalahan lain di mana masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemberdayaan perempuan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan pandangan Campbell J.P dalam buku Mutiarin & Zaenudin (2014:96-97), yang menjelaskan bahwa kepuasan pengguna merupakan kriteria penting dalam menilai efektivitas program. Semakin tinggi kualitas produk atau jasa yang diberikan, semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat, yang pada gilirannya berdampak positif bagi lembaga.

4. Tingkat Input dan Output

Efektivitas dapat dilihat dari hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output). Ketika output lebih besar daripada input, program dianggap efisien. Sebaliknya, jika input lebih besar dari output, program tidak efisien.

Analisis tingkat input dan output dalam Program Pemberdayaan Perempuan meliputi komponen berikut:

a. Pencapaian Target Program

Pencapaian target menunjukkan keberhasilan program dalam merealisasikan sasaran dan memenuhi tujuan yang direncanakan. Upaya ini melibatkan perencanaan strategi yang matang, pengukuran indikator keberhasilan, pemantauan berkala, dan evaluasi hasil. Dalam konteks Program Pemberdayaan Perempuan, pencapaian target dinilai cukup efektif. Hal ini terlihat dari keberhasilan program dalam mengakomodir kegiatan terkait pemberdayaan, baik dari pelayanan maupun dari pelaksanaan program pemberdayaan perempuan.

Pendekatan ini sesuai dengan teori Campbell J.P (dalam Mutiarin & Zaenudin, 2014:96-97), yang menyatakan bahwa tingkat efisiensi dan efektivitas dapat diukur melalui perbandingan input dan output, di mana output yang lebih besar dari input menunjukkan efisiensi.

b. Dampak Program

Dampak merujuk pada pengaruh yang dihasilkan dari pelaksanaan program, baik positif maupun negatif. Dampak tersebut dapat bersifat internal, yang berasal dari masyarakat, maupun eksternal, yang berasal dari faktor luar. Dalam Program Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, dampak yang dihasilkan dinilai positif.

Semua kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana, dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan program. Teori Campbell J.P (dalam Mutiarin & Zaenudin, 2014:96-97) juga mendukung pendekatan ini, di mana efektivitas dan efisiensi program dianalisis berdasarkan perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output).

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Pencapaian tujuan menyeluruh merujuk pada sejauh mana organisasi berhasil melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian ini dilakukan secara umum dengan menggunakan berbagai kriteria, yang mencakup efektivitas dalam menjalankan fungsi organisasi serta dampaknya secara keseluruhan.

a. Penilaian Efektivitas Program

Penilaian efektivitas adalah proses untuk mengevaluasi sejauh mana sebuah organisasi atau program telah mencapai tujuan yang direncanakan. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan rencana awal, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Berdasarkan hasil observasi, Program Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dinilai belum efektif. Dimana adanya keterbatasan kegiatan dalam pelaksanaan pemberdayaan kepada masyarakat, karena pemberdayaan bukan hanya milik Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Penilaian ini tidak sejalan dengan teori Campbell J.P, sebagaimana dikutip oleh Mutiarin & Zaenudin (2014:96-97), yang menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur berdasarkan sejauh mana organisasi menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan, dengan menilai sejumlah kriteria untuk menghasilkan gambaran umum efektivitas organisasi.

b. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi merujuk pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang berhasil memenuhi tujuannya dengan efisien.

Dalam konteks Program Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, efektivitas organisasi dinilai belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga kerja serta sumber daya yang tersedia, yang berdampak pada pelaksanaan program yang belum maksimal.

Keterbatasan ini menunjukkan bahwa terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal alokasi dan pengelolaan sumber daya agar tujuan program dapat tercapai dengan lebih baik. Teori Campbell J.P, sebagaimana dikutip oleh Mutiarin & Zaenudin (2014:96-97), menekankan pentingnya organisasi menjalankan tugasnya secara menyeluruh untuk mencapai hasil yang diinginkan, dengan memanfaatkan sebanyak mungkin kriteria sebagai alat evaluasi efektivitas.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana ialah suatu hal yang penting dalam menunjang pelaksanaan program. Apabila sarana dan prasarannya kurang maka akan menghambat pelaksanaan program kegiatan.

Dalam faktor penghambat program pemberdayaan perempuan, yaitu masih kurangnya sarana prasarana pendukung seperti kebutuhan aset kantor sehingga pelaksanaan program menjadi kurang optimal.

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia juga merupakan faktor yang penting dalam organisasi dalam mencapai tujuan. Sumber daya manusia di suatu organisasi berperan sebagai perencana dan pelaksana kegiatan dan program.

Faktor penghambat dari efektivitas program pemberdayaan perempuan datang dari faktor internal, yaitu sumber daya manusia yang masih kurang sehingga dinilai kurang optimal dalam melaksanakan kegiatan program.

2. Faktor Pendukung

a. Adanya Mekanisme yang baik

Dalam mekanisme kegiatan dapat berupa tahapan, waktu dan tempat kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditentukan.

Faktor pendukung efektivitas program pemberdayaan perempuan, yaitu adanya mekanisme yang baik dalam penyusunan rencana dan anggaran agar kegiatan program sesuai dengan perencanaan dan tidak salah sasaran.

b. Sasaran Program yang jelas

Tujuan program ialah sasaran program yang jelas agar mendukung pelaksanaan program. Dalam faktor pendukung program pemberdayaan perempuan adanya sasaran yang jelas dan sudah dilaksanakan sesuai dengan kriteria program, yang mana sasaran program pemberdayaan perempuan adalah perempuan produktif dan juga gender.

SIMPULAN

Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, pada aspek keberhasilan program diketahui indikator kemampuan operasional dan mekanisme kegiatan sudah efektif karena adanya penyusunan rencana kegiatan mekanismenya, dari lokus kegiatan dimana, sasaran dan tujuan kegiatannya apa. *Kedua*, pada aspek keberhasilan sasaran diketahui indikator kebijakan organisasi dalam ketetapan sasaran dan prosedur dalam menentukan sasaran sudah efektif karena memiliki sasaran dan tujuan yang jelas terhadap program, serta sudah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. *Ketiga*, pada aspek kepuasan terhadap program diketahui indikator pemenuhan kebutuhan belum efektif karena kebutuhan kantor, aset, sumber daya manusia dan anggaran masih kekurangan, pada indikator kepuasan masyarakat sudah cukup efektif karena sasaran sudah sesuai dengan yang ditentukan para pelaksana program. *Keempat*, pada aspek tingkat input dan output diketahui indikator pencapaian target program sudah cukup efektif, karena program dapat mengakomodir kegiatan terkait pemberdayaan dan dampak program sudah efektif karena pencapaian target sudah terealisasi dan menghasilkan dampak yang jelas terhadap masyarakat. *Kelima*, pada aspek pencapaian tujuan menyeluruh diketahui indikator penilaian efektivitas program dan efektivitas organisasi belum efektif karena adanya keterbatasan kegiatan dalam pelaksanaan pemberdayaan terhadap masyarakat dan adanya keterbatasan sumber daya atau tenaga kerja sehingga kurang optimal dalam melaksanakan kegiatan program. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi dua, yaitu: faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambatnya ialah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana kebutuhan baik di kantor ataupun penunjang pelaksanaan program. Sedangkan, faktor pendukungnya ialah adanya mekanisme yang baik, sasaran program yang jelas dilihat dari pelaksanaan yang sesuai dengan kriteria program dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, dkk. (2023) 'Pemberdayaan Masyarakat.', *PT Global Eksekutif Teknologi. Sumatera Barat*, p. 1.
- Aryadi, T. (2020) 'Analisis Efektivitas Kerja Pegawai Studi Pada Bidang Pemeliharaan & Peningkatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon', *CV. Elsi Pro. Cirebon.*, p. 27. Available at: https://repository.syekhnurjati.ac.id/4611/1/Editor_3.pdf.
- Indonesia, R. (2021) 'Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak', *Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, p. 5. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/239983/permen-pppa-no-13-tahun-2021>.
- Kartina, R.R.H. (2019) 'Efektivitas Pergantian Kepemimpinan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik (Study Kasus Pergantian Kepemimpinan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur).', *LaksBang Justitia*, p. 21.
- Mutiarin, D.A.Z. (2014) 'Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori', *Pustaka Pelajar. Yogyakarta*, pp. 96–97.
- Pasalong, H. (2022) 'Teori Administrasi Publik', *Alfabeta*, p. 4.